

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Rajawali Pers. Malang.
- 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Pernadamedia Grup. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bardan Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet Ketiga. Mandar Maju. Bandung.
- Burhan Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dian Kartikasari. 2010. *Kerentanan Perempuan dalam Perdagangan Perempuan, Migrasi, Hiv/Aids*. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Henny Nuraeny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Linda Amalia Sari. 2010. *Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan. Jakarta.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono .2011. *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen, dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bandung.
- Muhammad Abdulkadir, 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muladi dan Bardan Nawawi. 1992. *Teori-teori Kebijakan Publik*. Bandung.

- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Ranika Cipta. Jakarta.
- Moelyanto, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cipta Karya Bandung.
- Paul Sinlaeloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press. Malang.
- R. Sugandhi. 1980. *KUHP dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya.
- R.Susilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT.Grafindo Persada. Yogyakarta.
- Soetandyo Wignyasoebroto. 1997. *Perempuan dalam Wacana Trafficking*. PBKI. Yogyakarta.
- Syamsuddin Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing: Malang.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rianeka Cipta. Jakarta.
- Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika. Jakarta.

SKRIPSI :

- Saifullah. 2004. *“Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi (Hand Out)”*. Skripsi. Fakultas Syariah UIN Malang.
- Sri Septianty Arista Yufeny. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Makassar.

JURNAL :

- Claudie A. Kermite, *Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol VI/No. 4/Juni/2017, Manado.
- Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam. *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Sebuah Catatan Kritis*. <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm->

pidana/294-, diakses tanggal 24 September 2020, pukul 00.12.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DOKUMEN LAINNYA :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Konvensi untuk Izin Menikah, Usia Minimum untuk Menikah dan Pendaftaran Pernikahan 1988

Protokol Opsional untuk Pemufakatan Hak Sipil dan Politik Internasional melalui UU No 7 tahun 1984

Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan 1998

Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 / 1990

Protokol Opsional bagi Konvensi Hak-hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak 2001

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children 2000

Protokol Opsional untuk Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan 2000

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang terorganisasi)
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia Tahun 2011-2014
Konvensi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) yang di Ratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2017.